

Ir. Akbar Tandjung

PERAN MAHASISWA DALAM MENSUKSESKAN PEMILU 1997¹

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Dekan Fakultas
Syariah IAIN Sunan Gunung Djati
Pimpinan Senat Mahasiswa
Fakultas,

Para mahasiswa yang saya cintai,
serta Hadirin-hadirat yang berba-
hagia.

Pertama-tama marilah kita
panjatkan puji dari syukur ke-
hadirat Allah SWT. karena berkat
limpahan rahmat, taufiq dan hi-
dayah-Nya kita semua dapat
mengikuti acara Kuliah Umum
pada hari ini dalam keadaan sehat
sejahtera, lahir dan batin. Sha-
lawat dan salam kita sampaikan
pada junjungan kita Rasulullah
Muhammad SAW. yang telah

membimbing umat manusia ke ja-
lan yang benar, yakni dengan aga-
ma Islam.

Selebihnya, saya menyam-
paikan rasa terima kasih atas ke-
sempatan yang diberikan kepada
saya untuk hadir dan bersilatur-
rahmi dengan segenap Civitas
Akademika Fakultas Syariah
IAIN Sunan Gunung Djati Serang
ini. Dan dalam suasana bulan
Syawal ini dengan kerendahan
dan ketulusan hati saya menyam-
paikan Selamat Hari Raya Idul
Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Ba-
tin. Kepada saya diminta untuk
memberikan Kuliah Umum yang
bertemakan "Peran Mahasiswa
Dalam Mensukseskan Pemilu
1997". Tema ini menurut saya
mempunyai makna yang strategis
bagi dunia kampus, khususnya

1) Ceramah Menteri Negara Perumahan Rakyat R.I. dalam Studium General ke XLVII di Fakultas
Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Serang-Jawa Barat, 26 Februari 1997.

mahasiswa dalam ikut berpartisipasi untuk mensukseskan Pemilu 1997 dengan segala dimensinya.

Saudara, sekalian yang saya hormati,

Beberapa bulan lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan agenda nasional yang sangat strategis, yakni Pemilu 1997, dan akan dilanjutkan dengan SU MPR 1998. Dua kegiatan nasional ini merupakan bagian penting dari Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan yang telah menjadi pola dalam kehidupan politik berdasarkan Sistem Demokrasi Pancasila. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II serta untuk mengisi keanggotaan MPR. Melalui pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan ikut menentukan jalannya kekuasaan negara dan pemerintahan.

Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian sangat jelas bahwa

MPR adalah penjelmaan dari seluruh rakyat serta merupakan representasi politik dari seluruh rakyat. Di dalam MPR-lah makna kedaulatan rakyat itu ditegakkan dan diwujudkan.

Sebagai perwujudan dari kedaulatan di tangan rakyat, maka MPR melaksanakan Sidang Umum yang bertujuan untuk menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, serta ketetapan-ketetapan lainnya. Kemudian Presiden sebagai mandataris MPR mengangkat para menteri untuk melaksanakan GBHN. Anggota DPR yang sekangus menjadi anggota MPR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHN yang dilaksanakan oleh Presiden, baik melalui mekanisme APBN maupun media pengawasan lainnya. Bersamaan dengan pengangkatan para menteri, Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara juga mengangkat Ketua dan anggota DPA dan BPK.

Dari uraian di atas terlihat dengan jelas betapa Pemilu dan SU MPR mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan yang diakui oleh pemerintah Orde Baru

sebagai pola yang efektif dalam pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila dalam dinamika kehidupan politik.

Saudara-saudara,

Pemilu 1997 memiliki makna yang penting dan strategis bagi perjalanan bangsa Indonesia di masa depan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemilu 1997 terasa lebih besar maknanya bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal demikian mengingat Pemilu 1997 merupakan pemilu pertama dalam PJP II. Para anggota badan permusyawaratan dan perwakilan yang terpilih dalam Pemilu 1997 nanti akan mengabdikan hingga abad ke-21. Sebagaimana kita maklumi bahwa pada PJP II yang berada dalam kurun waktu abad ke-21, pembangunan nasional kita akan tinggal landas, bangsa kita akan memasuki era Kebangkitan Nasional yang kedua, kita akan menjadi bangsa yang maju dan mandiri. Mengingat begitu pentingnya makna Pemilu 1997 dan SU MPR 1998 itulah, maka tiada pilihan lain bagi kita sebagai bangsa, kecuali harus mensukseskannya, yaitu antara lain, dengan turut menciptakan iklim yang kondusif,

melaksanakan hak pilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan masukan bagi materi GBHN yang akan datang. Dengan demikian, maka amanat GBHN agar Pemilu 1997 merupakan pemilu yang berkualitas akan tercapai.

Mengapa Pemilu 1997 mesti berkualitas? Karena pemilu yang berkualitas dipercaya akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi proses demokratisasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada sisi lain, pemilu yang berkualitas akan melahirkan anggota-anggota badan permusyawaratan dan perwakilan yang berkualitas pula, sehingga dapat melahirkan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang dapat menjawab permasalahan bangsa dan negara serta dapat menghantarkan bangsa Indonesia memasuki abad ke-21, dengan segenap dinamika dan tantangannya.

Semenjak Orde Baru lahir kita telah melaksanakan pemilu sebanyak 5 kali yakni 1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992. Pemilu tahun 1997 adalah pemilu yang keenam kalinya. Dalam dinamika perkembangan dari pemilu ke pemilu, kita melihat bahwa kualiti

tas pemilu dapat dikatakan mengalami peningkatan dan kemajuan yang sangat berarti. Hampir semua kalangan menilai bahwa kualitas pemilu tahun 1992 jauh lebih baik dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ini merupakan pertanda yang baik bagi perkembangan demokrasi kita. Tentu kita semua berharap pemilu 1997 akan lebih meningkat lagi kualitasnya.

Peningkatan kualitas pemilu sebetulnya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Karena faktor manusia-lah yang paling menentukan terhadap proses dari produk pemilu.

Hal ini bisa dilihat dari tiga perspektif. *Pertama*, kesadaran politik rakyat akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan tingkat kecerdasan dan kemakmuran. Semakin tinggi derajat melek politik rakyat, maka semakin tinggi pula kesadaran politiknya untuk melaksanakan kewajiban politik dan menuntut hak politiknya sebagai warga negara. Sementara kesadaran politik adalah pondasi paling kokoh bagi terbangunnya partisipasi politik yang lebih dewasa dan kualitatif. Partisipasi politik yang sesungguhnya tidak akan lahir

pada masyarakat yang buta politik, yakni masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikan dan kemakmuran ekonominya. Sebaliknya, partisipasi politik yang sesungguhnya akan lahir dari masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan dan kemakmuran yang memadai, yang merupakan basis dari kesadaran politiknya.

Kedua, prinsip-prinsip dan mekanisme pemilu yang demokratis akan dijalankan dengan baik apabila masyarakat politik kita dan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu menjunjung tinggi prinsip taat asas. Artinya, setiap pemikiran, sikap dan perilaku politiknya didasarkan pada aturan main yang telah disepakati bersama. Prinsip taat asas ini akan dapat berjalan apabila betul-betul dipahami dan dihayati secara utuh oleh semua pihak. Hal ini bukan saja menuntut kecerdasan untuk memahami aturan main, tetapi juga integritas pribadi untuk berlaku terbuka dan jujur.

Ketiga, produk pemilu, yakni lembaga permusyawaratan dan perwakilan akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila diisi oleh orang-orang

yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan integritas politik yang tinggi. Dalam hal ini dibutuhkan orang-orang yang tidak sekedar ingin menjadi anggota dewan, tetapi betul-betul pejuang politik yang mempunyai komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan mensukseskan pembangunan nasional. Disini dituntut pula kualitas kenegarawanan -- disamping kualitas politik -- yang sangat penting untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, demi terjaganya kesinambungan pembangunan di masa depan.

Ketiga hal tersebut pada konteks yang lebih strategis merupakan proses pendidikan politik. Artinya, proses penyadaran masyarakat untuk mengerti dan memahami hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara, termasuk bagaimana mekanisme operasional dari hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, pemilu yang berkualitas akan mengajarkan secara empiris kepada masyarakat tentang berbagai hal tersebut di atas. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana terbangun interaksi politik yang sehat antara masyarakat dengan orsospol, antar orsopol dan orsopol dengan pemerintah. Inilah sisi

strategis pemilu sebagai pendidikan politik bagi masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

Pembangunan yang kita laksanakan selama PJP I telah mendatangkan berbagai bentuk keberhasilan, seperti meningkatnya tingkat kemakmuran dan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat sehingga melahirkan kesadaran kritis masyarakat akan hak dan kewajibannya. Sementara di sisi lain, kita juga menyaksikan tidak semua dimensi masyarakat kita tersentuh oleh dinamika pembangunan. Kita juga menyaksikan bahwa proses pembangunan juga dapat menimbulkan hal-hal yang kurang menguntungkan masyarakat luas.

Lantaran itu, saat ini persoalan keadilan dalam proses dan dinamika pembangunan menjadi isu sentral. Hampir setiap isu yang muncul selalu berkaitan dengan persoalan keadilan. Isu global tentang demokrasi, hak asasi, lingkungan dan sebagainya sebetulnya berujung pada keadilan. Demokrasi adalah persoalan keadilan politik, hak asasi adalah persoalan keadilan sosial-kemanusiaan, sedangkan lingkungan

adalah problem keadilan antar generasi.

Dalam konteks pemilu 1997, isu keadilan yang relevan adalah keadilan yang berdimensi politik. Keadilan politik merupakan cerminan dari tatanan politik yang terbuka, egaliter dan demokratis.

Keadilan politik yang hendak diwujudkan di negara kita adalah keadilan berdasarkan Demokrasi Pancasila. Demokrasi bisa berjalan apabila di dalam tatanan politik terdapat ruang politik bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan dan aspirasinya. Artikulasi aspirasi tersebut bisa lewat lembaga-lembaga perwakilan maupun yang secara langsung disampaikan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, maka ke depan partisipasi politik masyarakat perlu dipeluas. Rakyat perlu diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengemukakan pendapat, baik yang berkaitan dengan nasib dan kepentingan mereka maupun dalam melakukan kritik dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Berhubungan dengan hal tersebut, maka peningkatan fungsi lembaga-lembaga perwakilan

menjadi sangat relevan, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada wakil-wakilnya di DPR/MPR akan tetap terjaga. Kepercayaan politik masyarakat terhadap DPR/MPR merupakan faktor yang sangat penting bagi legitimasi politik negara. Kepercayaan politik masyarakat tersebut akan meningkat apabila lembaga perwakilan atau DPR/MPR mampu menampilkan kinerja yang baik dan berkualitas. Sedangkan kualitas kinerja MPR/DPR akan semakin meningkat apabila dihasilkan lewat proses pemilu yang berkualitas pula.

Saudara sekalian yang berbahagia,

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana fungsi dan peran yang bisa dimainkan oleh mahasiswa dalam konteks partisipasi untuk peningkatan kualitas pemilu 1997?

Kita telah sama-sama mafhum bahwa mahasiswa adalah kelompok dalam masyarakat yang mempunyai karakteristik yang khas dan tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat yang lain. Kalau kita cermati, paling tidak, mahasiswa mempunyai empat

karakteristik yang khas, yakni:

Pertama, sebagai kelompok kaum muda yang mengalami masa pendidikan yang relatif panjang, maka mahasiswa mendapatkan sosialisasi politik yang lebih lama dan relatif matang. Pengalaman sosialisasi atau pendidikan politik ini tentu akan mempengaruhi derajat kesadaran politik mereka, sehingga perhatian mereka terhadap masalah-masalah politik akan lebih tinggi.

Kedua, pengalaman kehidupan kampus yang secara kultural heterogen dan ditunjang oleh penyerapan terhadap etika ilmiah akan membangun sikap yang lebih terbuka, toleran dan demokratis. Hal demikian sangat penting bagi penyikapan-penyikapan yang mereka lakukan terhadap perkembangan kondisi masyarakat dan bangsanya.

Ketiga, dengan potensi dan kualitasnya, maka mahasiswa dapat dikatakan sebagai elite di kalangan angkatan muda. Posisi ini bukan saja akan memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan peran-peran sosial dan melakukan mobilitas vertikal dengan baik, tetapi juga memposisikan mahasiswa sebagai kelompok yang cukup berpengaruh dalam mem-

bentuk opini di masyarakat.

Keempat, persentuhan mahasiswa dengan berbagai pemikiran yang berkembang dalam kerangka kebebasan akademik akan membangun horison dan khasanah pemikiran yang luas. Hal ini merupakan potensi dasar bagi aktualisasi sikap dan perilaku sosial dan politiknya. Kesadaran eksistensial inilah yang sangat mendasar maknanya bagi dinamika kemahasiswaan, berikut resonsansinya kepada masyarakat lingkungannya.

Gambaran tersebut menjelaskan betapa strategisnya posisi sosial dan pengaruh politik mahasiswa bagi masyarakatnya. Lantaran posisinya yang demikian, maka dinamika kemahasiswaan diharapkan untuk tetap mampu melahirkan sikap obyektif, kritis, dan futuristik. Artinya, setiap pemikiran, sikap dan perilaku mahasiswa diharapkan tetap berjalan pada rel yang konstruktif sehingga dapat dipertanggungjawabkan, baik secara akademis maupun secara empiris di hadapan masyarakat..

Sebagai elite di kalangan kaum muda, dituntut berada di depan di dalam membawa dinamika sosial menuju pada ke-

majuan-kemajuan yang berarti, memainkan perannya sebagai kekuatan kontrol sosial sekaligus sebagai duta-duta pembaharu. Kedua fungsi tersebut dilakukan dengan didasari sikap kritis. Sikap kritis sangat berbeda dengan sikap apriori. Sikap kritis lebih didasarkan pada nilai-nilai obyektifitas dan bersifat konstruktif, sementara sikap apriori lebih menonjolkan subyektifitas dan cenderung untuk destruktif.

Dalam konteks posisinya sebagai elite di kalangan kaum muda inilah terletak tanggungjawab mahasiswa untuk memberikan contoh kepada masyarakatnya tentang partisipasi politik yang berkualitas pada pemilu 1997. Kalangan mahasiswa dituntut untuk memandu sikap dan perilaku politik masyarakat yang proaktif dan produktif, sehingga semuanya berjalan dalam kerangka mekanisme dan aturan main yang telah disepakati.

Untuk bisa memposisikan diri sebagai pemandu masyarakat, pertama-tama kalangan mahasiswa musti menunjukkan kesadaran partisipasinya yang tinggi, seperti mempergunakan hak pilihnya dalam pemilu. Memper-

gunakan hak pilih adalah perwujudan dari rasa tanggungjawab sebagai warga negara untuk menyukseskan pemilu 1997, serta refleksi dari kesadaran politik yang diaktualisasikan secara positif dan konstruktif. Sebaliknya mahasiswa diharapkan untuk menjauhkan diri dari perilaku golput, karena golput adalah cermin dari sikap masa bodoh dan apatis politik. Tentu apatisisme politik harus dijauhkan dari dinamika kemahasiswaan dan kemasyarakatan, karena tidak ada demokrasi politik yang bisa ditegakkan di atas apatisisme politik. Demokrasi adalah buah dari partisipasi politik.

Dengan aktualisasi kesadaran politik secara aktif dan positif itu, maka mahasiswa akan turut memberikan kontribusi bagi penciptaan suasana yang kondusif bagi munculnya partisipasi politik dari masyarakat luas untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu 1997. Partisipasi aktif dan positif kalangan mahasiswa akan mendorong masyarakat untuk juga berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pemilu 1997. Sikap dan perilaku mahasiswa biasanya menjadi cermin bagi sikap dan perilaku masyarakat. Lantaran

itu sudah sepatutnya mahasiswa mampu memberikan contoh yang positif kepada masyarakat, tentang bagaimana sikap dan perilaku politik yang partisipatif dan bertanggungjawab.

Saya kira mahasiswa Indonesia dituntut untuk menjaga citra dan jatidirinya sebagai cermin dan penyuara hati nurani masyarakat secara tepat. Sejarah kemahasiswaan di Indonesia telah memberikan pelajaran berharga kepada para mahasiswa saat ini, bahwa rupa-rupa perjuangan mereka yang dilandasi pada komitmen intelektual, yakni untuk memperhatikan dan merespons kondisi lingkungannya, telah menghasilkan prestasi sejarah yang monumental. Inilah yang patut diambil pelajaran dan hikmah oleh para mahasiswa saat ini, untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negaranya.

Yang harus tetap dicatat adalah bahwa dinamika dan aktual-

isasi peran mahasiswa dalam membangun dan mewujudkan cita-cita idealismenya tidak boleh lepas dari perjuangan seluruh rakyat, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang secara mandiri dilakukan oleh masyarakat. Tidak ada sejarah kemahasiswaan yang menunjukkan bahwa mahasiswa berjuang sendirian, tetapi justru menjadi bagian dari gerak perjuangan dan cita-cita segenap potensi bangsa. Bangunan kebersamaan dan persatuan seluruh masyarakat adalah jaminan bagi tercapainya cita-cita nasional kita dengan berbagai dimensinya.

Demikianlah beberapa catatan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.